Iftitah

Guru dan Pendidikan Agama di Sekolah

Oleh Muslih Usa

Ketua Penyunting JPI

Seorang teman dari Malaysia bertanya, dimanakah posisi agama dalam kehidupan bangsa dan negara RI? Dengan logika sederhana saya menjelaskan, bahwa agama menjadi nafas dan warna dalam setiap gerak kehidupan bangsa Indonesia, sehingga bangsa ini disebut sebagai masyarakat sosialis-religius. Sedangkan dalam kehidupan bernegara, agama tidak menjadi dasar negara, tetapi setiap kebijakan di negara ini tidak boleh bertentangan dengan ajaran agama.

Lantas bagaimana caranya agar bangsa Indonesia hidup dalam ruh agamanya, termasuk dalam kehidupan bernegara sekalipun agama tidak menjadi dasar negara tapi juga tidak mau disebut sekuler? Lanjut teman tadi. "Itu dilakukan melalui dunia pendidikan dengan mengajarkan agama pada anak didik sesuai agamanya; sejak pendidikan dasar sampai perguruan tinggi", jawab saya. Tapi teman saya itu justru tertawa terbahak-bahak dan saya yakin dia menertawai jawaban singkat itu.

Dia memberikan alasan, "bagaimana mungkin hal itu dilakukan dengan baik melalui pendidikan", tegasnya singkat. Pandangannya itu didasarkan pada kenyataan, bahwa pada waktu RUU Sisdiknas di bahas, di samping yang pro juga terdapat yang kontra dengan cukup tegas dan dengan alasan masing-masing.

Gaungnya bahkan pada tingkat dunia, karena dinilai khususnya pasal 12 dalam RUU itu diasumsikan telah mengusik hak asasi dan urusan agama dianggap sebagai urusan pribadi; bukan urusan negara. Sekarang RUU Sisdiknas memang telah disahkan menjadi UU pada tanggal 18 Juli 2003, tapi bagaimana menjamin pelaksanaannya, karena PP-nya hingga sekarang belum dikeluarkan. Demikian penjelasan atas sikapnya terhadap jawaban saya di atas.

Pendidikan agama dapat diartikan sebagai suatu proses, upaya dan cara mengajarkan ajaran agama tertentu pada anak didik sesuai satuan pendidikan yang diikutinya, agar menjadi anutan dan pandangan hidup baginya sebagai seorang warga negara. Melalui strategi ini diharapkan agar setiap warga negara memiliki pedoman hidup secara pribadi dan memegang teguh ajaran agamanya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Asumsi ini mengacu pada satu prinsip bahwa semua agama mengajarkan kebaikan pada para penganutnya.

Dalam UU Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 39 ayat 2 menegaskan bahwa pendidikan agama sebagai upaya untuk memperkuat iman dan taqwa

kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai agama yang dianut siswa dengan memperhatikan dan menghormati agama lainnya untuk mewujudkan persatuan nasional. Namun pada kenyataannya, belum semua satuan pendidikan melaksanakan pengajaran pendidikan agama, sekalipun semua pihak menyepakati bahwa ajaran agama perlu dipelajari dan dilaksanakan oleh setiap pemeluknya.

Kasus yang muncul adalah tidak diberikan dan tidak disediakannya guru pendidikan agama Islam bagi anak didik muslim yang belajar di sekolah-sekolah Nasrani, padahal jumlahnya cukup besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Atas kekhawatiran dangkalnya pengetahuan agama (Islam) bagi mereka ini yang sesungguhnya dapat terbantu oleh adanya pendidikan agama Islam di sekolah, maka khusus di Propinsi DIY pada 1998, dikeluarkanlah Surat Edaran Bersama (SEB) oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY, masing Nomor : 14/113/PP/Ed/1998, Nomor : WI/6/PP.00.4/1254/1998; dan Nomor : 450/717/1998, tanggal 15 Juni 1998, tentang *Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Agama Pada Sekolah Swasta* yang berciri khas agama. Namun Surat Edaran ini direspon secara negatif, terutama dari kalangan satuan pendidikan yang berciri khas agama Nasrani dan menolak pelaksanaannya.

Setelah 16 bulan dikeluarkan SEB yang disebutkan di atas dan tidak ada realisasi sebagaimana yang diharapkan, maka kehadiran SEB diperkuat

dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama RI masing-masing Nomor 4/U/SKB/1999 dan Nomor : 570/1999, tanggal 8 Oktober 1999 tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ini berlaku bagi seluruh satuan dasar dan menengah, baik negeri maupun swasta untuk memberikan pendidikan agama bagi anak didik sesuai agama yang dianutnya; sekalipun diketahui, bagi sekolah negeri hal ini tidak menjadi masalah.

Namun pada kenyataannya, SKB ini juga mendapat tanggapan yang tidak menggembirakan dan ditolak pelaksanaannya oleh kebanyakan satuan pendidikan yang berada di bawah Yayasan Nasrani. Sebagiannya dapat dilaksanakan dengan memindahkan tempat belajar ke lokasi lainnya. Itupun pemadatan dan lebih diutamakan pada siswa yang akan menempuh ujian akhir, sehingga efektifitas dan tingkat keberhasilannya juga masih dipertanyakan.

Hal ini berlangsung sampai disahkannya UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang terkenal paling heboh pro-kontra, sejak sosialisasi di masyarakat, pembahasan di DPR, sampai menjelang pengesahan yang sempat tertunda-tunda. Kelompok yang pro berkeinginan agar anaknya mendapat pendidikan agama di sekolahnya. Sedangkan yang kontra, lebih terkesan menolak pendidikan agama (Islam) dalam satuan pendi-

dikannya yang bercirikan agama lainnya, sekalipun kebanyakan anak didiknya berasal dari kalangan Islam.

Setelah mengalami beberapa kali penundaan dan kemudian disambut dengan aksi walk out Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI., pada tanggal 18 Juli 2003 RUU Sisdiknas ditetapkan menjadi UU. Selanjutnya oleh Pemerintah disahkan sebagai UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. Namun hingga Desember 2004 atau hingga 5 bulan dari pengesahannya, Peraturan Pemerintah (PP) sebagaimana disyaratkan sebagai penjelas UU ini belum dikeluarkan, sehingga pelaksanaannya belum sepenuhnya terwujud.

Tenggang waktu hingga 2 tahun sebagai batas maksimal dikeluarkan PP untuk penjelasan pelaksanaan UU Nomor 20 tahun 2003, dapat dimanfaatkan oleh berbagai lembaga terkait, terutama Departemen Agama, untuk menyiapkan segenap sarana-prasarana yang diperlukan, kurikulum, dan termasuk tenaga guru yang hingga kini di duga masih kurang. Namun yang lebih penting adalah bahwa UU Nomor 20 Tahun 2003 ada jaminan benar-benar dapat dilaksanakan di segenap satuan pendidikan dan tidak mengalami nasib seperti SEB tiga instansi di Propinsi DIY tahun 1988 atau juga SKB dua Menteri tahun 1999 yang dinilai juga gagal dalam pelaksanaannya, khususnya di kebanyakan sekolah swasta.

Dalam kaitan dengan kurikulum, sebagaimana ditegaskan M. Hajar Dewantoro, mempunyai kedudukan penting dalam seluruh proses pendidikan. Sebagai suatu rencana pendidikan, kurikulum menjadi pedo-

man dan pegangan tentang jenis, lingkup, dan urutan isi dan strategi proses pendidikannya, serta sekaligus sebagai sumber konsep dan landasan teoritis bagi pelaksanaan PAI khususnya, pada satuan pendidikan tertentu, memang perlu dikembangkan. Pengembangan dan penyempurnaan kurikulum yang dimaksud, agar tidak lagi tumpang tindih, repetikal, dogmatis, dan terhindarkan dari konsep ajar yang tidak ada relevansinya dengan kehidupan anak, sebagaimana yang sering dikritisi oleh pakar pendidikan.

Dalam kaitannya dengan tenaga guru yang akan melaksanakan amanat UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, terutama pasal 12 ayat 1 bahwa anak didik pada setiap satuan pendidikan, berhak mendapat pendidikan agama sesuai agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidikan yang seagama dengannya, di samping penambahan tenaga baru, juga perlu meningkatkan kualitas guru agama yang telah ada. Hal ini penting agar gagasan mewajibkan anak didik mendapat pendidikan agama sesuai agamanya, dapat terpenuhi secara efektif dan optimal sesuai yang digariskan kurikulum dan waktu yang tersedia di setiap satuan pendidikan.

Menurut Sri Haningsih, guru dalam era semakin kritisnya anak didik dan semakin tinggi serta jelasnya tuntutan masyarakat, maka guru harus tampil lebih profesional. Dengan mengutip penegasan Sardiman AM., (1986:133-134), dijelaskan tiga tingkatan profesional guru sebagai tenaga profesional kependidikan, yaitu:

Pertama, tingkatan *capable personal*, yaitu guru diharapkan

memiliki pengetahuan, kecakapan, keterampilan dan sikap yang mantap serta memadai, sehingga mampu mengelola proses belajar-mengajar secara efektif.

Kedua, tingkatan sebagai *innovator*, yaitu sebagai tenaga profesional kependidikan, guru harus memiliki komitmen terhadap perubahan dan reformasi. Di samping penguasaan terhadap pengetahuan, kecakapan dan keterampilan, juga sebagai personal yang responsif terhadap pembaruan sekaligus menyebarkannya melalui ide atau gagasan-gagasan yang efektif.

Ketiga, menempatkan diri sebagai *developer*. Selain menghayati kualifikasi yang pertama dan kedua, maka kedudukan guru sebagai *developer*, juga harus memiliki visi keguruan yang mantap dan dalam perspektif yang luas. Selanjutnya mampu dan bersedia secara perspektif dan prospektif menjawab tantangan-tantangan yang dihadapi oleh lingkungan pendidikan sebagai suatu sistem.

Sementara itu, Ahmad Tafsir (1992:114) menggariskan deskripsi kemampuan guru profesional meliputi : menguasai bahan bidang studi dalam kurikulum sekolah dan aplikasi bidang studi terkait dan memilih serta menggunakan. Selain itu, guru juga menguasai program belajar mengajar, seperti merumuskan tujuan pembelajaran khusus, mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar yang baik dan benar, memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, melaksanakan program pembelajaran yang telah disusun, mengenal kemampuan anak didik serta mampu merencanakan dan

melaksanakan pengajaran remedial (*remedial teaching*).

Kemampuan berikutnya adalah dalam hal mengelola kelas, mulai mengatur tata ruang kelas untuk proses pembelajaran sampai dengan menciptakan iklim belajar mengajar yang serasi dan kondusif. Guru juga harus mampu menggunakan media meliputi : mengenal dan menggunakan sumber atau referensi, membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, menggunakan dan mengelola laboratorium dalam rangka proses belajar mengajar, mengembangkan laboratorium, menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar.

Untuk mendukung hal di atas, Tafsir juga mengharuskan guru menguasai landasan-landasan kependidikan yang meliputi : kemampuan mengelola interaksi belajar mengajar, menilai prestasi siswa untuk kependidikan dan pengajaran. Guru juga menguasai fungsi dan program pelayanan dan bimbingan di sekolah, menyelenggarakan program layanan dan bimbingan di sekolah. Selain itu, juga mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah, dan memahami prinsip-prinsip dalam menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan dan keperluan pengajaran.

Deskripsi ini memperjelas bahwa di dalam memangku jabatan atau pekerjaan sebagai guru, ada tuntutan dan sekaligus tanggungjawab, karena di dalamnya menyangkut nasib anak-anak bangsa. Menurut S. Nasution (1983:108), masyarakat tidak dapat menerima pekerjaan guru semata-mata sebagai mata pencaharian belaka sejajar dengan pekerjaan tukang kayu atau saudagar. Pekerjaan

guru menyangkut pekerjaan tentang nasib anak, pembangunan negara dan masa depan bangsa.

Untuk bisa mewujudkan semua itu, Muzhoffar Akhwan berpendapat, bahwa guru harus memiliki kompetensinya, yaitu kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal dalam pelaksanaan tugasnya. Dengan mengutip penegasan Hasan Alwi (2002: 584) dijelaskan pengertian asal kompetensi (*competency*), yaitu kemampuan atau kecakapan. Apabila kompetensi dikaitkan dengan jabatan guru, maka kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya (Usman, 2002:14).

Agar mampu melaksanakan tugas secara efektif dan efisien, guru profesional harus memiliki kompetensi sebagai *instructional leader*, yaitu: (1) memiliki kepribadian ideal sebagai guru, (2) penguasaan landasan kependidikan, (3) menguasai bahan pengajaran, (4) kemampuan menyusun program pengajaran, (5) kemampuan melaksanakan program pengajaran, (6) kemampuan menilai hasil dan proses belajar-mengajar, (7) kemampuan menyelenggarakan program bimbingan, (9) kemampuan bekerjasama dengan sejawat dan masyarakat, dan (10) kemampuan menyelenggarakan penelitian sederhana untuk keperluan pengajaran (Danim, 2003:198-199).

Kompetensi guru tersebut di atas cenderung keguruan sifatnya. Sedangkan untuk dapat tampil secara profesional, guru dituntut memiliki karakteristik dasar (*basic traits*) sebagai elemen inti (*core elements*) yang membedakannya dengan guru

lain yang belum profesional.

Seperti dikemukakan Robert W. Rechey dalam Danim (2003), bahwa karakter utama yang harus dimiliki guru : (1) lebih mementingkan layanan kemanusiaan daripada mementingkan layanan yang semata berdampak pada kepentingan pribadi guru; (2) adanya kesadaran pada diri guru untuk mempelajari konsep dan prinsip pengetahuan khusus yang mendukung keahliannya (materi dan metodologi pembelajaran); (3) memiliki kualitas dan secara kontinyu mampu mengikuti perkembangan dalam pertumbuhan jabatan dan tuntutan institusi pendidikan pada umumnya; (4) memiliki komitmen terhadap kode etik; (5) mensyaratkan suatu kegiatan intelektual yang tinggi; (6) adanya organisasi yang dapat meningkatkan standar pelayanan, disiplin profesi dan kesejahteraan anggotanya; dan (7) memandang profesi sebagai karier seumur hidup dan permanen.

Untuk dapat mewujudkan keseluruhan kemampuan untuk memenuhi aspek profesionalitas seorang guru, maka diperlukan strategi peningkatan kualitas yang *qualified* dan kemauan yang dibangun berdasarkan kemampuan profesional dalam payung ilmu profesi yang telah diperolehnya. Oleh karena itu, peningkatan profesionalisme guru masa depan perlu memanfaatkan pendekatan yang bersifat kolaboratif. Guru diarahkan kepada penelitian dengan konteks kultural sekolah dimana guru mengajar, sehingga guru dapat merumuskan masalah yang dihadapi secara bersama, kemudian guru diajak mencoba merumuskan dan melakukan langkah-langkah solusinya. Selanjutnya guru diajak

melakukan refleksi terhadap solusi yang disepakati dan akhirnya diajak melakukan pengembangan proses pembelajaran sesuai dengan temuan CAR (*Collaborative Action Research*) yang mereka lakukan bersama pihak kedua.

Model CAR ini sebagai alternatif penataran guru yang memiliki legitimasi yang kuat, baik dilihat dari aspek akademik maupun *setting cultural* sekolah. Model CAR juga dapat digunakan untuk meningkatkan profesionalisme guru secara lebih bermakna bahkan dapat dikatakan menjadi jembatan yang efektif terhadap kesenjangan antara tuntutan teori dan tuntutan praktis profesi guru.

Dalam model CAR guru diajak berkolaborasi untuk melihat berbagai problem pembelajaran yang dijumpai di kelasnya. Apabila problem tersebut dapat diselesaikan melalui penelitian kolaboratif, berarti guru yang bersangkutan secara sadar dapat melihat permasalahan yang sebenarnya dan juga dapat memecahkan permasalahan itu bersama kolaboratornya.

Menurut Suyanto (2000:32), model CAR sebagai alternatif yang menyempurnakan model penataran, memiliki beberapa keunggulan. *Pertama*, perencanaan dapat dilakukan secara *bottom up* sehingga akan membuat guru lebih memiliki komitmen terhadap persoalan yang dihadapi. *Kedua*, CAR tetap relevan dengan konteks sekolah karena ia dilaksanakan dari dan oleh guru di sekolah yang bersangkutan melalui kerja sama dengan kolaborator. *Ketiga*, guru tidak harus meninggalkan kelas sehingga para siswa tidak akan dirugikan.

Dalam kaitan dengan keberadaan Guru Pendidikan Agama Islam (GPAI), menurut Mas'ud (2002:202-203), secara teknis guru perlu melakukan dan bertindak: (1) Sebagai *role model*, suri teladan bagi kehidupan akademik dan sosial keagamaan, baik di dalam maupun di luar kelas yang tercermin dalam ucapan dan tingkah laku sehari-hari, seperti membaca buku, berdiskusi, meneliti atau kegiatan *amar ma'ruf nahi munkar* (kontrol sosial). (2) Sikap kasih sayang kepada siswa; antusias dan ikhlas mendengarkan atau menjawab pertanyaan, serta menjauhkan sikap emosional dan feodal, seperti cepat marah dan tersinggung karena pertanyaan siswa sering disalahartikan sebagai mengurangi wibawa. (3) Memperlakukan siswa sebagai subyek dan mitra belajar. Kemampuan membaca dan berpikir kritis perlu ditingkatkan secara konsisten dalam proses belajar-mengajar. Sudah saatnya iklim dialogis dan interaktif di kelas di mulai dari tingkat dasar. (4) Sebagai fasilitator yang lebih mengutamakan bimbingan, menumbuhkan kreativitas siswa, serta interaktif dan komunikatif dengan siswa.

Untuk itu, menurut Akhwan, bahwa profesionalisme guru; termasuk GPAI, yang berdasarkan tugas yang diembannya, memperlakukan mutu layanan dalam empat jenis kompetensi, yaitu: (1) Kompetensi *Profesional*, yaitu menguasai landasan kependidikan, menguasai bahan pengajaran, menyusun dan melaksanakan program pengajaran, menilai hasil dan proses belajar-mengajar yang telah dilaksanakan. (2) Kompetensi *Personal*; yaitu mengembangkan

kepribadian: bertakwa, berperan dalam masyarakat sebagai warga negara, mengembangkan sifat-sifat terpuji yang dipersyaratkan bagi jabatan guru. (3) Kompetensi *Sosial* yaitu: kemampuan berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswa dalam proses pembelajaran dan bimbingan, serta secara integral sebagai warga masyarakat Indonesia, dan (4) Kompetensi *Spiritual* yaitu: kemampuan memilih dan mengamalkan keyakinan dan nilai kebenaran *rabbani* sebagai pedoman hidup.

Ada kecenderungan baru di masyarakat yang menuntut guru di sekolah agar memiliki penguasaan yang mantap terhadap substansi materi pelajaran yang diajarkan kepada pada murid dan menolak guru yang hanya menguasai metode-metode pembelajaran saja, karena mereka yang ingin menjadi guru menganggap cukup hanya dengan mengikuti program penyeteraan, seperti program Akta mengajar.

Kecenderungan tersebut merupakan kritik yang seharusnya direspon dengan mengoptimalkan metode mengajar untuk bidang studi tertentu secara spesifik. Sebagai contoh, dalam pengajaran metode mengajar tulis baca Al-Qur'an, agar siswa diajak berpikir rasional, bukan menghafal bentuk tulisan dan bacaan, dan metode mengajarkan Ilmu Tafsir Al-Qur'an interdisipliner, agar siswa mampu dan berani berijtihad. Selanjutnya perlu dipahami pula, mengapa sekolah membutuhkan guru-guru yang berwibawa, yang mampu menegakkan ketertiban pendidikan di sekolah.

Tuntutan dan harapan masyarakat terhadap profesi guru yang

merupakan jasa mencerdaskan kehidupan generasi muda agar dapat meningkatkan taraf hidupnya di masyarakat yang dinamis semakin dirasakan. Inti dari profesionalisme ialah kemampuan seseorang di dalam profesi tertentu untuk menerapkan pengetahuan dan keahliannya dalam memberikan pelayanan sesuai dengan kemampuannya itu. Sedangkan kemampuan tersebut dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan diakui serta dihargai setimpal dengan jasa yang diberikan. Sebaliknya, apabila penyandang profesi tersebut dirasakan kurang kemampuan profesionalismenya, maka dengan sendirinya penghargaan masyarakat pun akan berkurang.

Peningkatan dan pengembangan profesionalisme meliputi berbagai aspek antara lain kemampuan guru dalam menguasai kurikulum, kemampuan dalam menggunakan metode dan sarana dalam proses belajar-mengajar, melaksanakan penilaian proses dan hasil belajar, serta kemampuan memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar, disiplin dan komitmen guru terhadap tugasnya. Tujuan yang hendak dicapai adalah produktivitas kerja yang tinggi serta mutu karya semakin lama semakin baik dan kompetitif.

Tentang mutu karya yang lebih berkaitan dengan hasil kerja guru, maka ini juga berkaitan dengan penggunaan metode dalam pembelajaran. Menurut Imam Moedjiono, proses pembelajaran pendidikan agama Islam, memang masih di dominasi oleh pendekatan *ekspositorik*, sehingga peserta didik selalu diposisikan sebagai pemerhati atau pendengar ceramah.

Kondisi seperti ini dirasa kurang memberdayakan peserta didik, baik dalam upaya menumbuhkan semangat belajar maupun dalam memperkaya pengalaman belajar (*learning to do*) dengan meningkatkan interaksi di lingkungannya sehingga sulit membangun pemahaman dan pengetahuan terhadap dunia di sekitar (*learning to know*). Lebih jauh lagi, model yang dikembangkan selama ini juga tidak memiliki peluang atau kesempatan yang berupaya membangun rasa percaya diri (*learning to be*) maupun kemampuan berinteraksi dengan individu atau kelompok yang beragam (*learning to live together*) di tengah masyarakat (Budimansyah, 2003:129).

Khususnya tentang guru agama, disadari bahwa mayoritas komunitas ini masih mempertahankan metode ceramah dalam proses pembelajaran yang dilakukan di depan kelas dan masih jarang yang menerapkan ceramah interaktif misalnya, apalagi menerapkan *active learning*. Menurut Moedjiono, metode ceramah memang merupakan metode yang paling praktis, mudah dan murah bagi guru, termasuk untuk mengajarkan pendidikan agama Islam. Namun penerapannya harus sesuai dengan materi dan disampaikan secara efektif. Melalui ceramah interaktif sebagai metode alternatif, akan lebih mendorong terwujudnya *active learning* dan hal ini sangat diperlukan untuk meningkatkan gairah belajar, karena rasa senang dalam belajar.

Dalam penerapan metode pembelajaran, GPAI profesional seharusnya menguasai metode-metode yang tepat agar pembelajaran

yang dilakukan dapat berhasil dalam target yang ditentukan. Melihat sistem pendidikan pada sekolah-sekolah kita yang menjejali anak didik dengan jumlah mata pelajaran yang banyak dalam satu hari, maka dapat mengakibatkan kelupaan. Ini disebabkan karena ketidakmampuan mengingat seluruh pelajaran yang diajarkan pada hari yang sama.

Hal-hal yang menyebabkan seseorang cepat lupa antara lain :

Pertama, *retroactive* dan *proactive interference*. *Interference* adalah gangguan atas perubahan situasi yang terjadi dalam memori otak manusia. Contoh, jika seorang peserta didik mempelajari ilmu tertentu kemudian pada jam berikutnya mempelajari ilmu lain yang tidak ada kaitannya dengan ilmu yang dipelajari pada jam sebelumnya, maka pengetahuan yang diperoleh pada jam kedua akan dapat menghalangi untuk mengingat pengetahuan yang pertama. Hal ini disebut dengan *retroactive interference*. Sebaliknya pengetahuan yang diperoleh pada jam pertama dapat mengganggu untuk mengingat pelajaran jam kedua, dan hal ini disebut dengan *proactive interference*.

Kedua, *trace decay* pada menit-menit awal. *Trace decay* adalah mudahnya otak manusia melupakan sesuatu yang dipelajari dalam hitungan menit atau bahkan detik. Ini dapat dibuktikan dengan seseorang yang mendengarkan ceramah atau presentasi, dan ini tidak terlepas dari mekanisme kerja otak manusia yang pada dasarnya memang terbatas.

Ketiga, *banyaknya konfirmasi yang harus diingat*. Salah satu faktor yang menyebabkan seseorang mudah melupakan sesuatu adalah karena

ingin tahu atau terpaksa belajar yang banyak. Berawal dari asumsi ini, tidaklah dibenarkan kalau seorang guru menyampaikan materi yang padat dan penuh dengan hal-hal baru yang harus diingat oleh peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa peserta didik akan dapat belajar banyak jika materi yang disampaikan tidak terlalu padat.

Keempat, *melupakan yang tidak disukai*. Dalam belajar, seseorang tidak akan mengingat-ingat sesuatu yang tidak diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang tidak mempunyai motivasi belajar kuat, akan lebih mudah melupakan pengetahuan yang disampaikan guru (Bligh, 2000:5)

Dalam upaya menempatkan keberadaan Guru Pendidikan Agama khususnya Islam (GPAI) dalam posisi yang tepat; adaptif dan responsif terhadap perkembangan, maka peningkatan aspek profesionalisme adalah sebuah keharusan. Ini mengingat bahwa tuntutan terhadap guru agar dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan efisien dalam mendidik anak-anak bangsa, telah semakin eksplisit dan dikritisi secara terbuka.

Sesuai dengan posisi penting yang dijabat guru dan menyangkut kecerdasan bangsa, termasuk GPAI yang sering disebut pembimbing dan pengawal moral anak didik sebagai kader masa depan, maka seluruh kritik ke arah kualitas harus direspon dengan positif. Sikap tersebut tentu saja bukan hanya karena guru dibayar oleh masyarakat, tapi lebih dari itu bahwa profesi guru di samping sarat dengan tanggungjawab kedinasan

juga, disertai dengan tanggungjawab moral untuk mencerdaskan bangsa sebagai modal dasar pembangunan.

Oleh karena itu, sikap dan sifat terbuka yang disertai dengan motivasi yang kuat adalah jalan untuk peningkatan kualitas yang telah menjadi keharusan bagi guru. Sedangkan bagi mereka yang akan bergabung dalam barisan guru di negeri ini, harus membuktikan terlebih dahulu bahwa dia mampu dan mempunyai kompetensi yang jelas serta memiliki komitmen untuk mampu bersuka cita secara konsisten dalam menjalankan profesinya. Langkah ini sebagai konsekuensi untuk mencapai kesetaraan dengan tuntutan dan kewajiban yang telah diberikan kepada jajarannya guru, khususnya GPAI bersama dengan teman sejawat lainnya, yang kini sedang bekerja dalam membangun moral bangsa ini

Untuk melancarkan pelaksanaan tanggungjawab mencerdaskan kehidupan bangsa, maka berilah kepada guru; (1) ketenangan bagi hidupnya melalui penetapan kesejahteraan yang memadai, (2) jaminan jalan baik sarana dan prasarana untuk peningkatan kualitas yang memang membutuhkan dukungan semua pihak yang terkait; (3) dukungan daya didik setiap keluarga karena pendidikan menganut prinsip terpadu antara pendidikan di sekolah dengan pendidikan dalam keluarga dan masyarakat; dan (4) jaminan hukum untuk pelaksanaan tugas dan karena itu, GPAI dan jajarannya guru agama lainnya, sedang menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah sebagai penjelas pelaksanaan UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas.***